

Design Survey Wawancara

<div>Informan</div> <div>Pertanyaan</div>	Kabid Lijamsos (Bpk. Hartadi, ST., MM.Kes)	Koord. Pendamping PKH Kec. Ngoro (Bpk. Qusaeri)	Keluarga Penerima Manfaat (Lanjut Usia)	Keluarga Penerima Manfaat (Pendidikan)	Keluarga Penerima Manfaat (Pendidikan)	Keluarga Penerima Manfaat (Pendidikan)	Keluarga Penerima Manfaat (Kesehatan)
<div>Jenis Manfaat Pemerintah</div> <div>1.Apa dampak positif atau manfaat yang dihasilkan dari pelaksanaan program PKH?</div>	Keluarga penerima manfaat mendapatkan bantuan finansial untuk digunakan mengakses Kesehatan bagi ibu hamil, memenuhi kebutuhan sekolah pada komponen Pendidikan, dan memenuhi kebutuhan hidup bagi komponen lanjut usia	<div>Bantuan dana tiap-tiap komponen pada penerima manfaat :</div> <div>Ibu Hamil 600.000 Balita 600.000 Lansia 480.000 Disabilitas 480.000 Anak SD 180.000 Anak SMP 300.000 Anak SMA 400.000</div> <div>Bantuan ini diberikan selama 5 tahap dalam satu tahun</div>	-	-	-	-	-
<div>2. Bagaimana tipe manfaat yang dihasilkan bersifat berkelanjutan dan memberikan dampak positif?</div>	Pada ibu hamil ini digunakan untuk pemenuhan gizi bagi calon bayi, agar tidak terjadi gizi buruk, pada komponen Pendidikan ini mewajibkan anak wajib sekolah selama 12 tahun. agar tidak sampai terputus. Pada komponen lansia digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka	Pada saat pertemuan P2K2 kita arahkan dan motivasi. Bahwa setelah dapat bantuan PKH, ada kewajiban yang harus dilaksanakan penerima manfaat sesuai komponen.	-	-	-	-	-

<p>Keluarga Penerima Manfaat</p> <p>1. Apa manfaat yang dirasakan dengan adanya program bantuan PKH?</p>	-	-	Mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari	Bermanfaat membantu biaya sekolah anak	Meringankan kebutuhan sekolah anak di SMA	Dibantu untuk kebutuhan anak-anak di sekolah	Dapat uang yang nantinya saya gunakan untuk keperluan bayi, kedepannya kan banyak kebutuhan
<p>2. Digunakan untuk apa manfaat dari program bantuan PKH?</p>	-	-	Untuk makan sehari-hari, beli beras dan ikan	Untuk keperluan sekolah, terutama buat bensin. Karena jarak dari rumah ke sekolah cukup jauh	Buat beli seragam sekolah, tapi kalau ada kebutuhan mendesak terpaksa saya pakai dulu. Seperti kebutuhan hajatan dan beli beras buat makan keluarga	Beli sepatu, seragam sekolah & tabungan	Beli ayam, sayur buah.
<p><b>Kepentingan Yang Memengaruhi Pemerintah:</b></p> <p>1. Dalam implementasi PKH, tentunya akan melibatkan banyak kepentingan. Siapa saja pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam kebijakan ini ?</p>	<p>Pusatnya ada Kementrian sosial sebagai pembuat regulasi, kemudian ada :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinator regional</li> <li>2. Koordinator wilayah</li> <li>3. Koordinator kabupaten</li> <li>4. Koordinator kecamatan</li> <li>5. Asisten Pendamping PKH</li> </ol>	-	-	-	-	-	-

<p>2. Apa peran dari stakeholder tersebut dalam implementasi kebijakan PKH?</p>	<p>1. Koordinator regional bertanggung jawab atas koordinasi pelaksanaan PKH di tingkat regional</p> <p>2. Koordinator wilayah bertanggung jawab atas pelaporan pelaksanaan dan kinerja SDM PKH di tingkat provinsi</p> <p>3. Koordinator kabupaten bertugas membantu kepala Dinas Sosial kabupaten dalam pelaksanaan PKH dan mengoordinasikan sumber daya manusia PKH di tingkat kabupaten</p> <p>4. Koordinator kecamatan bertugas melaksanakan tugas pendampingan PKH di kecamatan</p> <p>5. Asisten Pendamping PKH bertugas membantu koordinator kecamatan dalam melaksanakan tugas pendampingan PKH di kecamatan dan desa</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
---	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

<p><b>Derajat Perubahan</b> Pemerintah</p> <p>1. Apa derajat perubahan yang diharapkan dari PKH terhadap keluarga penerima manfaat?</p>	<p>Terjadinya graduasi. Graduasi alamiah ; berakhirnya kepesertaan dikarenakan KPM sudah tidak lagi masuk komponen kriteria kepesertaan</p> <p>Graduasi Sejahtera mandiri ; Kondisi ekonomi meningkat dan dikategorikan mampu sehingga tidak mendapat bantuan PKH lagi.</p>	<p>Graduasi. Penerima manfaat lepas dari PKH</p>	-	-	-	-	-
<p>2. Bagaimana kebijakan PKH dapat mengukur tingkat keberhasilan dalam mewujudkan perubahan yang diinginkan sebagai bagian dari tujuan utama program PKH?</p>	<p>Kita pantau terus lewat pertemuan bulanan (P2K2), Kita kasih motivasi untuk graduasi, Kita tanya pemanfaatan dana bantuan, harus digunakan sesuai dengan komponen kepesertaan</p>	<p>Dipantau dari pertemuan bulanan (P2K2)</p>	-	-	-	-	-

<p>Keluarga Penerima Manfaat</p> <p>1. Apa perbedaan yang dirasakan sebelum dan sesudah adanya program bantuan PKH?</p>	-	-	Sebelum dapat bantuan PKH, keuangan pas-pasan setelah dapat bantuan ada peningkatan pendapatan buat memenuhi kebutuhan sehari-hari	Sangat terasa perbedaannya, setelah dapat bantuan PKH, ada tambahan uang buat keperluan sekolah	Setelah adanya PKH sedikit banyak membantu kebutuhan anak di sekolah	Yang saya rasakan setelah dapat bantuan PKH ini, ya meningkatkan pendapatan untuk anak yang sekolah dan kami sangat terbantu	Saya pertama kali dapat bantuan PKH jadi sangat terbantu sekali
<p><b>Letak Pengambilan Keputusan</b> Pemerintah</p> <p>1. Dalam kebijakan PKH, siapa yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan?</p>	<p>Yang utama ada Kementerian sosial. Untuk di kabupaten ada Kepala Dinas sosial melalui Kabid Lijamsos.</p> <p>Semisal jika ada KPM yang melanggar aturan. Koord. pendamping membuat laporan ke saya yang kemudian saya teruskan ke kepala dinas untuk pengambilan keputusan.</p>	Dinas sosial.	-	-	-	-	-

2. Apa ada peraturan daerah yang mengatur mekanisme PKH di Kabupaten Mojokerto?	Untuk PKH, tidak ada peraturan daerah. Kita mengikuti langsung peraturan dari kementerian sosial	Tidak ada, mengikuti kementerian sosial	-	-	-	-	-
<b>Pelaksana Program Pemerintah</b> 1. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan program PKH di Kabupaten Mojokerto?	1. Kepala Dinas Sosial 2. Kepala Bidang Perlindungan & Jaminan Sosial 3. Koordinator PKH Kabupaten 4. Koordinator PKH Kecamatan 5. Asisten Pendamping PKH	Untuk tingkat kecamatan ada Koordinator PKH Kecamatan dan Pendamping desa/Asisten Pendamping	-	-	-	-	-
2. Apakah para pelaksana program memiliki tingkat kompetensi yang cukup untuk menjalankan tugas mereka?	Para pendamping PKH ada pelatihan sebelum terjun ke masyarakat, Jadi saya rasa pendamping PKH punya kompetensi yang cukup baik	Koordinator hingga pendamping mengikuti pelatihan dan diklat terlebih dahulu sebelumnya	-	-	-	-	-

3. Apa hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan program PKH?	Kurangnya kesadaran penerima manfaat untuk mengikuti pertemuan bulanan (P2K2). Untuk mengatasi hal ini, kita jemput dirumahnya langsung. Kecuali KPM tersebut sakit	KPM kadang ada yang tidak ikut pertemuan bulanan (P2K2)	-	-	-	-	-
Keluarga Penerima Manfaat 1. Bagaimana pelayanan yang diberikan pelaksana program dalam melayani PKH?	-	-	Ramah	Bagus	Pendampingnya ramah	Baik	Baik

<p><b>Sumber Daya Yang Digunakan</b> Pemerintah</p> <p>1. Sumber daya apa saja yang dilibatkan dalam pelaksanaan PKH di Kabupaten Mojokerto ?</p>	<p>Sumber Daya Manusia :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Dinas Sosial,</li><li>2. Kepala Bidang Perlindungan &amp; Jaminan Sosial</li><li>3. Koordinator PKH Kabupaten</li><li>4. Koordinator PKH Kecamatan</li><li>5. Asisten Pendamping PKH</li></ol> <p>Sarpras : Kantor bagi tiap Koordinator yang ada pada tiap wilayah</p> <p>Dana PKH berasal dari APBN</p>	-	-	-	-	-	-
<p>2. Apakah program PKH didukung oleh sumber daya yang memadai dan sesuai kebutuhan?</p>	<p>Sangat didukung</p>	<p>Didukung, untuk kantor kami ada di Kecamatan Ngoro, lantai 3.</p>	-	-	-	-	-



<p><b>Keluarga Penerima Manfaat</b></p> <p>1. Berapa dana bantuan yang ibu peroleh dari PKH?</p>	-	-	Uang 800.000 tiap tahap untuk 2 orang (Lanjut Usia)	Anak saya SMP, dapat 300.000 tiap tahap	400.000 tiap tahap untuk anak saya yang SMA	Saya punya dua anak yang sekolah di SD & SMP, yang SD dapat 180.000, SMP dapat 300.000 tiap tahap	Dapat 600.000
<p>2. Apakah terdapat kendala dalam pendistribusian dana bantuan kepada keluarga penerima manfaat?</p>	-	-	Tidak ada	Tidak ada	Tidak	Tidak	Tidak ada
<p><b>Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor yang terlibat</b></p> <p>1. Apa kepentingan dan strategi yang dilakukan oleh aktor yang terlibat dalam implementasi PKH?</p>	Dinas sosial memiliki kepentingan dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan PKH, meliputi validasi calon KPM, pembinaan SDM PKH dan pengawasan terhadap hasil kerja Koordinator PKH pada tiap wilayah kerja	-	-	-	-	-	-

<p><b>Karakteristik Lembaga Pemerintah</b> 1. Bagaimana karakteristik lembaga yang terlibat dalam memengaruhi pelaksanaan PKH?</p>	<p>Dinas sosial sebagai penindak lanjut arahan dari kementerian sosial. Kami berperan dalam pelayanan yang berfokus pada kesejahteraan sosial masyarakat, termasuk perlindungan sosial dan bantuan sosial</p>	-	-	-	-	-	-
<p><b>Tingkat Kepatuhan &amp; Respon Pelaksana Pemerintah</b> 1. Bagaimana pihak yang terlibat dalam implementasi PKH mematuhi aturan &amp; prosedur yang telah ditetapkan?</p>	<p>Tiap-tiap koordinator patuh dan menjalankan tugas dengan baik, karena kita minta pertanggung jawabannya, ada laporan bulanan ke kementerian sosial, kemudian tembusan ke dinas sosial.</p>	Loyal dengan pimpinan	-	-	-	-	-
<p>2. Dalam pelaksanaan PKH, Bagaimana kepatuhan KPM dalam menjalankan kewajibannya ?</p>	<p>KPM berkewajiban untuk memanfaatkan dana PKH sesuai komponen masing-masing. Ketika pertemuan bulanan (P2K2) pendamping akan menanyakan hal itu, dan memberi masukan untuk melaksanakan kewajiban. Kalau melanggar kewajiban tentu ada sanksi berupa peringatan lisan hingga pencabutan bantuan</p>	Kita arahkan untuk menjalankan kewajiban saat pertemuan P2K2, Penerima manfaat patuh, mudah diatur dan diarahkan	-	-	-	-	-